

EVALUASI PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA PARIJATAH KULON

Oleh :

Mohammad Rizky Fauzi¹⁾, Safrieta Jatu Permatasari²⁾, Leni Vitasari³⁾

^{1,2,3} Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

¹email: mohhalilintar077@gmail.com

²email: safrieta@untag-banyuwangi.ac.id

³email: lenivitasari76@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 29 Maret 2026

Revisi, 27 Mei 2026

Diterima, 29 Mei 2026

Publish, 30 Mei 2026

Kata Kunci :

Evaluasi,
Penyaluran Dana,
Bantuan Langsung Tunai,
Kesejahteraan.



ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan evaluasi penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Sumber penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang dikelola berdasarkan data jenuh dan dianalisis berdasarkan pemikiran Tyler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD di Desa Parijatah Kulon telah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Penetapan penerima bantuan dilakukan melalui pendataan dan musyawarah desa secara transparan sehingga bantuan tepat sasaran. Secara keseluruhan, program BLT-DD dinilai berhasil dan layak untuk terus dilanjutkan dengan evaluasi secara berkala guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diharapkan mampu mempertahankan mekanisme penyaluran BLT-DD yang transparan dan tepat sasaran serta melakukan evaluasi berkala sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Mohammad Rizky Fauzi

Afiliasi: Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Email: mohhalilintar077@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Salah satu program yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

BLT merupakan bantuan sosial berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin atau tidak mampu. Program ini bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan (Andriani & Putra, 2021). Pemberian BLT tidak hanya berfungsi sebagai

langkah jangka pendek dalam menjaga daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi strategi stabilisasi ekonomi nasional. Pelaksanaan BLT di Indonesia pertama kali dilakukan pada tahun 2005 sebagai kompensasi terhadap kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Pada masa pandemi COVID-19, program ini kembali diaktifkan pada tanggal 30 April 2020 dan diperluas cakupannya melalui mekanisme Dana Desa, karena pandemi telah memukul keras perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah

desa untuk menyalurkan sebagian dana desa dalam bentuk BLT kepada keluarga miskin yang terdampak pandemi, kehilangan pekerjaan, dan belum menerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Pra Kerja (Kemenkeu, 2020)

Kebijakan BLT bertujuan sebagai perlindungan sosial jangka pendek untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai masalah seperti ketidaktepatan sasaran, data penerima yang tumpang tindih, keterlambatan penyaluran, serta penggunaan bantuan yang cenderung bersifat konsumtif (Aini & Fathurrahman, 2022).

Idealnya, BLT tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi juga dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Jika dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti modal usaha atau alat pertanian, maka bantuan tersebut dapat memberikan dampak yang lebih berkelanjutan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Lestari & Hidayat, 2023).

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memanfaatkan bantuan tersebut untuk kebutuhan konsumtif seperti pangan, pulsa, atau listrik. Kurangnya literasi finansial, minimnya pendampingan dari perangkat desa, dan lemahnya kontrol sosial menyebabkan bantuan ini belum bertransformasi menjadi kekuatan produktif. Lebih jauh, masalah pendataan yang tidak akurat menyebabkan adanya warga mampu yang ikut menikmati bantuan, sementara warga miskin yang layak justru terabaikan, seperti warga masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau berpenghasilan di bawah UMR, tempat tinggal yang tidak layak dan juga lansia yang tinggal sendiri. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya sistem verifikasi dan validasi data penerima manfaat di tingkat lokal, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial baru di tengah masyarakat (Maulana & Widodo, 2022).

Salah satu wilayah yang menghadapi persoalan serupa adalah Desa Parijatak Kulon, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Desa ini memiliki karakteristik sosial ekonomi khas pedesaan, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, buruh harian, dan pedagang kecil. Ketergantungan pada sektor informal menjadikan pendapatan warga tidak stabil dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok. Program BLT Dana Desa di Parijatak Kulon dimaksudkan untuk membantu kelompok masyarakat ini agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup selama masa krisis. Namun, hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan program tersebut, baik dari sisi mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran, maupun pemanfaatan dana bantuan. Beberapa warga yang tergolong mampu masih tercatat sebagai penerima bantuan, sementara keluarga miskin yang belum terdata sering

kali tidak mendapatkan haknya. Selain itu, sebagian masyarakat penerima cenderung mengandalkan bantuan tersebut tanpa upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi produktif (Salsabila & Yuliana, 2024).

Fenomena tersebut menimbulkan dilema kebijakan: apakah program bantuan langsung tunai benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau justru menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan sebuah kerangka evaluasi yang mampu mengukur sejauh mana tujuan program tercapai secara konkret. Dalam konteks ini, teori Tyler (1942) tentang Goal Oriented Evaluation menjadi landasan konseptual yang relevan. Menurut Tyler, evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan program telah tercapai berdasarkan hasil nyata yang diukur. Fokus utama teori ini adalah pada goal attainment pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya (Arikunto & Jabar, 2020). Dengan demikian, keberhasilan suatu program tidak diukur dari seberapa besar dana yang disalurkan atau seberapa banyak penerima yang terdaftar, melainkan dari sejauh mana hasil yang diperoleh selaras dengan tujuan yang diharapkan.

Pendekatan Goal Oriented Evaluation menilai sejauh mana tujuan program BLT tercapai dengan membandingkan antara tujuan kebijakan dan hasil yang terjadi di lapangan. Jika terdapat perbedaan antara tujuan dan hasil, maka perlu dilakukan perbaikan pada pelaksanaan dan pengawasan program agar lebih efektif.

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya dilihat dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT masih cenderung bersifat bantuan sementara dan belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat, bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan fundamental yang senantiasa dihadapi oleh umat manusia. Sebagai masalah klasik dengan tingkat kompleksitas yang tinggi, kemiskinan dialami oleh hampir seluruh negara di dunia. Bahkan negara yang tergolong makmur dan kaya pun tidak terlepas dari persoalan ini. Kemiskinan sering kali berjalan seiring dengan ketimpangan, ketidakmerataan, serta ketidakadilan sosial, yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan sosial lanjutan sebagai relasi maupun dampak dari kondisi tersebut. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Penanggulangan kemiskinan merupakan serangkaian upaya terpadu, baik dalam aspek ekonomi maupun kemanusiaan, yang bertujuan untuk mengangkat individu dan kelompok masyarakat keluar dari kondisi kemiskinan secara berkelanjutan dan permanen (Yusdianatari et al., 2025).

Fenomena kemiskinan di pedesaan seperti di Desa Parijatah Kulon bukan hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, informasi, teknologi, dan peluang usaha. Oleh karena itu, keberhasilan BLT tidak cukup diukur dari aspek penyaluran dana semata, melainkan juga dari sejauh mana program ini mampu membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjadi mandiri secara ekonomi dan sosial. BLT yang dikelola secara bijak dapat menjadi sarana transisi menuju masyarakat produktif, namun jika dikelola secara pasif, program ini justru kehilangan arah dan tujuan.

Berdasarkan pandangan teori Tyler, maka evaluasi program BLT di Desa Parijatah Kulon akan difokuskan pada tingkat pencapaian tujuan kebijakan. Sejauhmana program ini telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, apakah sasaran penerima sudah tepat, dan bagaimana pemanfaatan dana tersebut terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian keluarga. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi dasar dari penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai evaluasi pelaksanaan program BLT di tingkat desa, serta memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah agar kebijakan bantuan sosial ke depan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parijatah Kulon Desa Parijatah Kulon."

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dengan dasar rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian maka fokus penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Parijatah Kulon Desa Parijatah Kulon ditinjau berdasarkan teori Tyler. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan penelitian di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Desa Parijatah Kulon Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Lokasi tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan lokasi penelitian mudah diakses, sehingga mudah dijangkau sehingga waktu dan biaya dalam penelitian lebih efisien. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik

snowball, yaitu proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informasi akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti diperlukan dalam suatu penelitian ilmiah, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- Observasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung, pengamatan dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung ke tempat objek penelitian. Pada observasi ini, peneliti mengamati lingkungan yang ada di tempat penelitian, kantor Desa Parijatah Kulon, dan informan
- Wawancara (interview). Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan wawancara bebas terpimpin, dengan mengajukan pertanyaan terstruktur. Selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data yang dicari terkait topik yang akan diteliti. Maka dari itu wawancara tersebut akan menggambarkan jenis wawancara, jenis pertanyaan, lama waktu wawancara, dan prosedur melakukan wawancara pada penelitian kualitatif.
- Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, foto, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Tehknik dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah dan alur berdasarkan teori Miles dan Huberman dalam Pasolong (2017, hal.17-18) yaitu:

- Reduksi data
- Penyajian Data
- Verifikasi dan Penarikan Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji evaluasi penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut peneliti menjabarkan sebagai berikut:

- Tujuan dan Kebijakan Program BLT

Program BLT Dana Desa (BLT-DD) merupakan kebijakan pemerintah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama masyarakat miskin dan rentan. Keberhasilan program ini dapat dilihat dari tercapainya tujuan utama, yaitu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA), diketahui bahwa tujuan utama program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari. Bantuan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, program BLT-DD juga bertujuan untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih dialami oleh sebagian masyarakat desa..

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual, tujuan program BLT-DD telah dirumuskan dengan jelas dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan BLT DD lahir sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus upaya percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Secara kebijakan, BLT-DD diarahkan untuk memberikan bantuan tunai secara langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah ditetapkan melalui mekanisme pendataan dan musyawarah desa.

Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan untuk menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan, meningkatkan transparansi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT-DD. Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa yang menyampaikan bahwa mekanisme evaluasi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Proses evaluasi tersebut melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun, RT, dan RW melalui musyawarah desa untuk meninjau pelaksanaan program serta memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.

Pemerintah desa melakukan evaluasi pelaksanaan BLT-DD secara berkala setiap tiga bulan melalui musyawarah desa. Evaluasi ini bertujuan menilai apakah penerima bantuan masih memenuhi kriteria sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Keputusan mengenai penetapan atau pergantian penerima BLT-DD dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan data dari kepala dusun, RT, dan RW agar bantuan tetap tepat sasaran.

b. Indikator dan Pengalaman Pelaksanaan

Indikator pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan aspek penting dalam menilai sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kerangka evaluasi menurut teori Tyler, indikator pelaksanaan tidak hanya menitikberatkan pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada mekanisme penetapan penerima, proses pendataan, serta verifikasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan program dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA), diketahui bahwa indikator utama dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat yang

tergolong miskin ekstrem. Penetapan KPM BLT-DD dilakukan berdasarkan data Usaha Gizi Desa/Keluarga (UGDK) yang telah mengidentifikasi keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi tinggi, sehingga keluarga tersebut diprioritaskan sebagai penerima bantuan.

Sebagai kelompok lanjut usia yang tergolong rentan secara ekonomi dan fisik, kemudahan serta kecepatan penyaluran bantuan menjadi faktor penting dalam memastikan akses terhadap bantuan sosial. Salah satu penerima bantuan menjelaskan bahwa proses penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berlangsung dengan mudah dan tidak membutuhkan waktu tunggu yang lama. Dengan demikian, bantuan dapat segera dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti bahan makanan dan kebutuhan kesehatan.

Proses penerimaan BLT-DD yang mudah dan cepat menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran bantuan telah berjalan dengan baik. Bantuan yang diterima dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa program BLT-DD memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta membantu meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu.

c. Instrumen dan teknik Pengukuran

Instrumen dalam penyaluran BLT-DD didukung oleh dokumen administrasi seperti KTP dan kartu keluarga, daftar penerima, bukti penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program bantuan kepada masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA), dijelaskan bahwa instrumen utama yang digunakan dalam pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah dokumen identitas kependudukan berupa E-KTP yang masih aktif. Penggunaan E-KTP aktif menjadi persyaratan penting karena data penerima BLT-DD akan dimasukkan ke dalam sistem pendataan resmi yang terintegrasi.

Keberadaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang aktif memungkinkan proses pencatatan, verifikasi, dan pengawasan data dilakukan secara lebih akurat, sehingga dapat meminimalkan risiko kesalahan data maupun tumpang tindih penerima bantuan sosial. Dalam praktiknya, masih terdapat warga yang secara kondisi ekonomi tergolong layak menerima BLT-DD, namun belum memiliki E-KTP atau NIK aktif.

Indikator tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan masyarakat secara komprehensif. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya di lapangan, sangat jarang ditemukan warga yang memenuhi seluruh 18 indikator kemiskinan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa melakukan penyesuaian dalam

teknik pengukuran kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Penilaian kelayakan lebih difokuskan pada kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok, kestabilan pekerjaan, tingkat pendapatan, serta kondisi ekonomi keluarga secara umum.

Pendekatan ini mencerminkan adanya keseimbangan antara ketentuan normatif dan realitas sosial di masyarakat desa. Dengan menjadikan kondisi ekonomi sehari-hari sebagai acuan utama, pemerintah desa dapat menetapkan penerima BLT-DD secara lebih realistis dan tepat sasaran. Informasi mengenai kondisi keseharian masyarakat diperoleh dari hasil pengamatan langsung serta laporan dari kepala dusun dan perangkat desa yang memahami situasi sosial ekonomi warga di wilayahnya masing-masing.

d. Perbandingan Hasil Aktual dengan Tujuan Program

Tujuan utama Program BLT-DD adalah memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat desa yang tergolong miskin dan rentan secara ekonomi, membantu pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, serta mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA), diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di desa telah berjalan tepat sasaran. Ketepatan sasaran tersebut dicapai melalui serangkaian proses yang sistematis, mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi data, hingga pembahasan dalam musyawarah desa (musdes).

Hasil tersebut juga diperkuat oleh keterangan Kepala Desa Parijatah Kulon yang menyatakan bahwa proses penentuan penerima BLT-DD dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa agar bantuan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Hasil pelaksanaan BLT-DD menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan telah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Verifikasi data dan musyawarah desa dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

e. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut merupakan bagian penting dalam evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), karena berfungsi sebagai dasar perbaikan dan penguatan pelaksanaan program ke depan. Dalam konteks evaluasi kebijakan, rekomendasi disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program serta pengalaman para pelaksana di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KESRA), diperoleh keterangan bahwa secara umum penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Penyaluran BLT-DD dilakukan secara rutin dan terjadwal setiap tiga bulan sekali, dengan besaran bantuan sebesar Rp300.000 per bulan yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Mekanisme penyaluran yang teratur ini memberikan kepastian bagi penerima manfaat, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Penilaian positif tersebut menunjukkan bahwa dari sisi teknis penyaluran, program BLT-DD telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kendala berarti di lapangan.

Program BLT-DD memiliki peran yang cukup penting dalam membantu masyarakat, khususnya bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu. Bantuan yang diberikan melalui program BLT-DD dinilai mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti kebutuhan pangan dan kebutuhan rumah tangga lainnya

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan BLT-DD di Desa Parijatah Kulon telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program, yaitu membantu masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi. Bantuan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Ketepatan sasaran penerima bantuan didukung oleh proses pendataan, verifikasi, dan musyawarah desa yang dilakukan secara transparan dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT-DD dilakukan secara akuntabel dan menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan BLT-DD telah sesuai dengan tujuan program sehingga dapat dinilai berhasil. Oleh karena itu, program ini perlu terus dilanjutkan dengan evaluasi berkala serta didukung oleh program pemberdayaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Aini, L., & Fathurrahman, M. (2022). Evaluasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Politik*, 6(2), 101–112.
- Andriani, N., & Putra, H. (2021). Efektivitas program bantuan langsung tunai (BLT) dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1), 53–64.
- Anggara, A. W., Imaniar, D., & Permatasari, S. J. (2025). Analisis Tantangan Membangun

- Meritokrasi Perangkat Desa Lembahbangkulon, Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. *Crossroad Research Journal*, 2(4), 1–18.
- Arikunto. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arikunto, & Jabar. (2020). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Kemenkeu. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Kemensos. (2021). *Profil kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia tahun 2021*.
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2023). Analisis dampak bantuan langsung tunai terhadap perekonomian masyarakat desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 77–89.
- Maulana, R., & Widodo, A. (2022). Evaluasi implementasi kebijakan BLT Dana Desa di masa pandemi Covid-19 di Desa Sidoharjo. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 151–162.
- Salsabila, D., & Yuliana, T. (2024). Peran pemerintah desa dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai terhadap masyarakat terdampak ekonomi di masa pasca pandemi. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 9(1), 45–58.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supriyadi, M., & Rahman, D. (2023). Implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. *Jurnal Administrasi Publik Nusantara*, 8(2), 201–2013.
- Yusdianatari, W. F., Wilujeng, S., & Permatasari, S. J. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 02 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Katarsis*, 2(2), 109–117.